

**PENGARUH AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK DENGAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN
PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Devie Maya Sofia

N I M : 10440200

Program Studi : Akuntansi S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo

Nama : Devie Maya Sofia

N I M : 10440200

Program Studi : Akuntansi S1

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 25 Februari 2014

Pembimbing I



David Efendi, SE, M.Si
NIK.19690913 199904 12

Pembimbing II



Dwiati Marziwi, SE.,Ak
NIK. 19721203 199603 11

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



Titi Rapi, SE, MM
NIP. 19630505 199003 2 003

Dosen Penguji :



David Efendi, SE, M.Si
NIK.19690913 199904 12



Slamet Santoso, SE, M.Si
NIK.19701016 199904 12



Arif Hartono, SE, M.SA
NIK. 19780120 200109 13

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak tedapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan / atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, Februari 2014


(Devie Maya Sofia)

Nim : 10440200

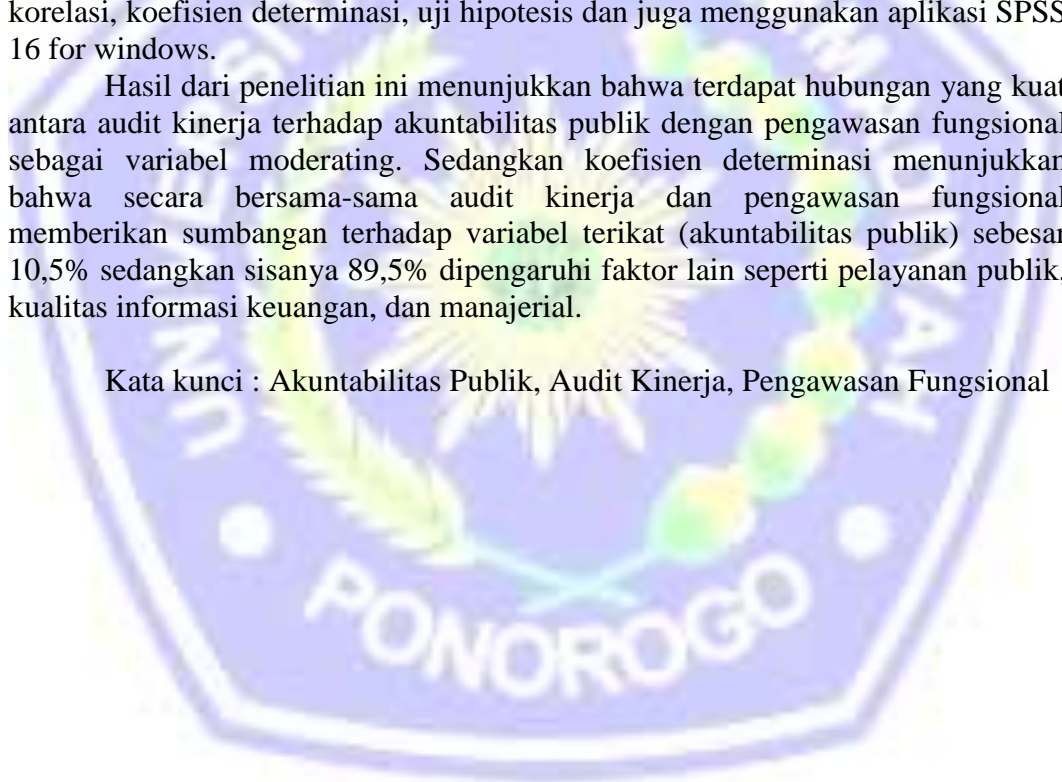
RINGKASAN

Akuntabilitas publik diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat, seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik maka diperlukan audit sektor publik khususnya audit kinerja serta diperlukannya pengawasan fungsional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, dan pengawasan fungsional sebagai variabel moderating pada SKPD di Pemerintah Kota Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SKPD di Pemerintah Kota Ponorogo yang berjumlah 125 responden. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji hipotesis dan juga menggunakan aplikasi SPSS 16 for windows.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional sebagai variabel moderating. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama audit kinerja dan pengawasan fungsional memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (akuntabilitas publik) sebesar 10,5% sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi faktor lain seperti pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, dan manajerial.

Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Audit Kinerja, Pengawasan Fungsional



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga dengan segala kemampuan serta kesungguhan hati, maka terselesaikanlah penyusunan skripsi untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan judul **“PENGARUH AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DENGAN PENGAWASAN FUNGSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DESA (SKPD) di PEMERINTAH KOTA PONOROGO”** dengan tiada halangan suatu apapun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan yang diberikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayah, Ibu dan Adikku serta keluarga tercinta yang selalu setia memberikan dukungan kepadaku baik materiil maupun spiritual.
2. Bapak H. Sulton, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Titi Rapini, SE,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

4. Ibu Dra. Khusnatul Zulfa, SE.,Ak selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Ibu Dwiati Marsiwi, SE.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Bapak David Efendi, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi semangat, bimbingan, petunjuk guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Dwiati Marsiwi, SE.,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi semangat, bimbingan, petunjuk guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi serta seluruh karyawan perpustakaan yang telah membantu.
9. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2010 yang telah banyak memberikan motivasi dan keceriaan tersendiri dalam keseharian yang penuh dengan kebersamaan.

Penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak ketidaksempurnaan karena keterbatasan dan pengetahuan peneliti, untuk itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiiin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, Februari 2014
Penulis



Devie Maya Sofia

MOTTO

*“Semakin Tinggi Pohon Tumbuh Semakin Kencang
Angin Menerpa”*

*...Pantang Menyerah, Jangan Mengeluh, dan
Jangan Bersedih... Semangat.....!!!!*

By. Devie Maya Sofia

PERSEMBAHAN

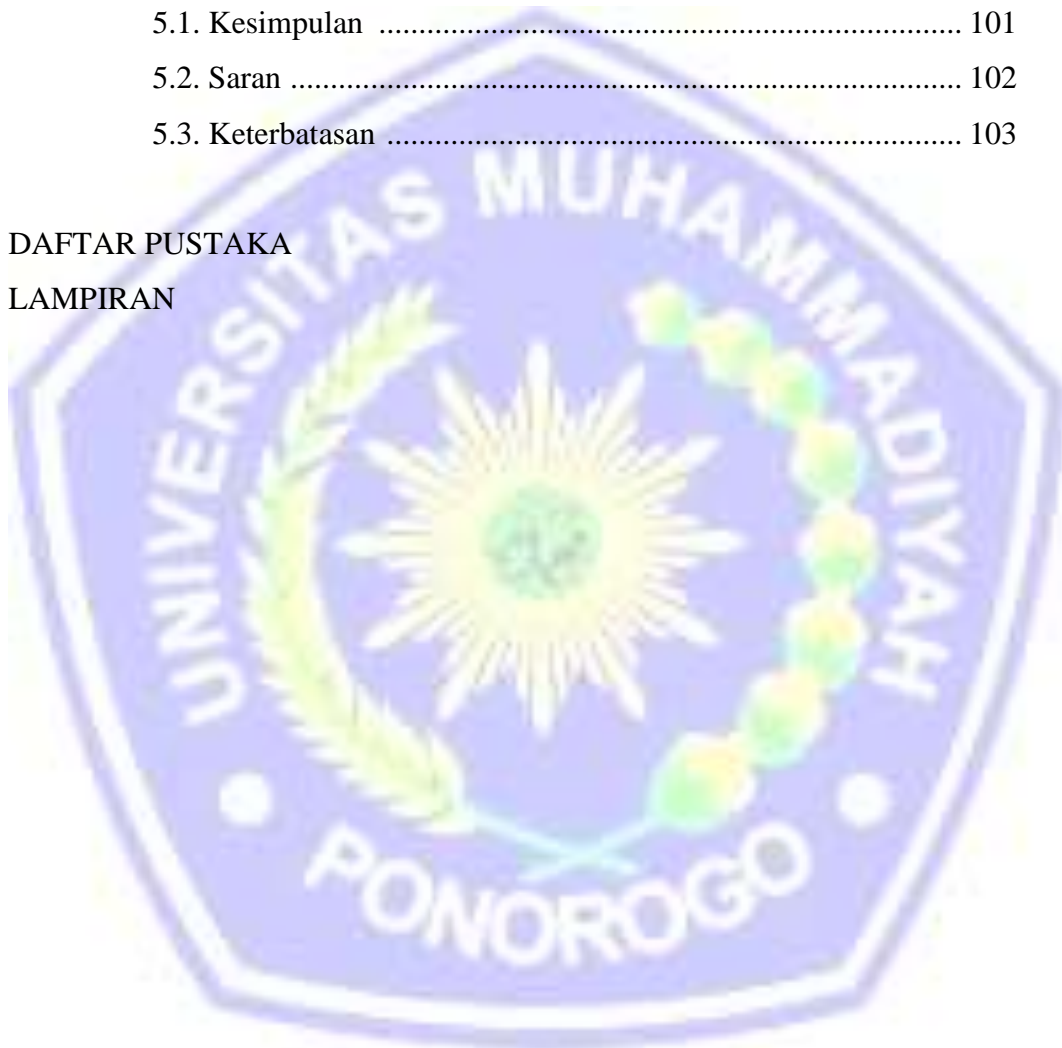
Kupersembahkan Karyaku Ini Buat.....

- ❖ Almamater Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- ❖ Ke dua orang tuaku Bapak Hadi Sumarno dan Ibu Katiyem yang selalu memberiku do'a, semangat dan kasih sayang yang tiada hentinya.
- ❖ Adikku Intan yang selalu memberikan semangat motivasi dan kasih sayang.
- ❖ Dosen-dosenku tarcinta Pak David, Bu Dwi, Bu Khusna, Bu Titi, Bu Nurul, Pak Slamet, Pak Azis, Pak Taufiq, Pak Sukmono, Bu Choirul yang selalu member semangat dan dukungan.
- ❖ Teman-teman organisasi UKM Bola Voli Ahmad Dahlan yang telah memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman KKN 2014 kelompok 21 Sofyan, Alvin, Ari, Triwik, Nurul, Nita, Anis, Wiwin, Fendi, Eko Budi, Ahmad J, Yusuf, Kholil, Doni, Onky, Mazid, Ervan, Margono, Titis yang selalu memberikan motivasi dan keceriaan tersendiri dalam keseharian yang penuh dengan kebersamaan.
- ❖ Seluruh teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2010, Titis, Sulis, Datul, Nita, Nurlaily, Wulan, Ani, Nia, Nura, Mike, Rahmansyah, Ari, Pipit, Rinda, Karina, Titi, Dilla atas semangat dan kerjasamanya.

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Pengesahan.....	i
Ringkasan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Motto.....	v
Persembahan	vi
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik Penelitian	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	10
2.2. Penelitian Terdahulu	39
2.3. Kerangka Pemikiran	40
2.4. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	44
3.2. Populasi dan Smapel Penelitian	44
3.3. Metode Pengambilan Data	46
3.4. Definisi Operasional Variabel	47

3.5. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	57
4.2. Pembahasan	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102
5.3. Keterbatasan	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 4.1 Daftar SKPD yang Menjadi Objek Penelitian	60
Tabel 4.2 Pernyataan Tentang Pemda Telah Mengembangkan Standart Target Waktu Untuk Menangani Tugas-Tugas Rutin	61
Tabel 4.3 Pernyataan Tentang Perlu Pengimplementasian Standart Target Waktu	61
Tabel 4.4 Pernyataan Tentang Perlu Perlu Implementasi Audit Internal Oleh Bawasda Setiap Tahun yang Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT)	62
Tabel 4.5 Pernyataan Tentang Pengolahan APBD Dilakukan Ekonomis, Menghindari Pengeluaran yang Boros dan Tidak Produktif	62
Tabel 4.6 Pernyataan Tentang Pengelolaan APBD Dilakukan Efisien, Penggunaan Terendah untuk Mencapai Tujuan Tertentu	63
Tabel 4.7 Pernyataan Tentang Pengelolaan APBD Dilakukan Efektifitas, Semua Program yang Ditargetkan Dapat Mencapai Hasil	63
Tabel 4.8 Pernyataan Tentang Perlu Adanya Pelatihan Untuk Staf Auditor BAWASDA untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Tentang Sistem Akuntansi (Sistem Pembukuan Berpasangan dan Accrual Basis Accounting) dan Auditing	64

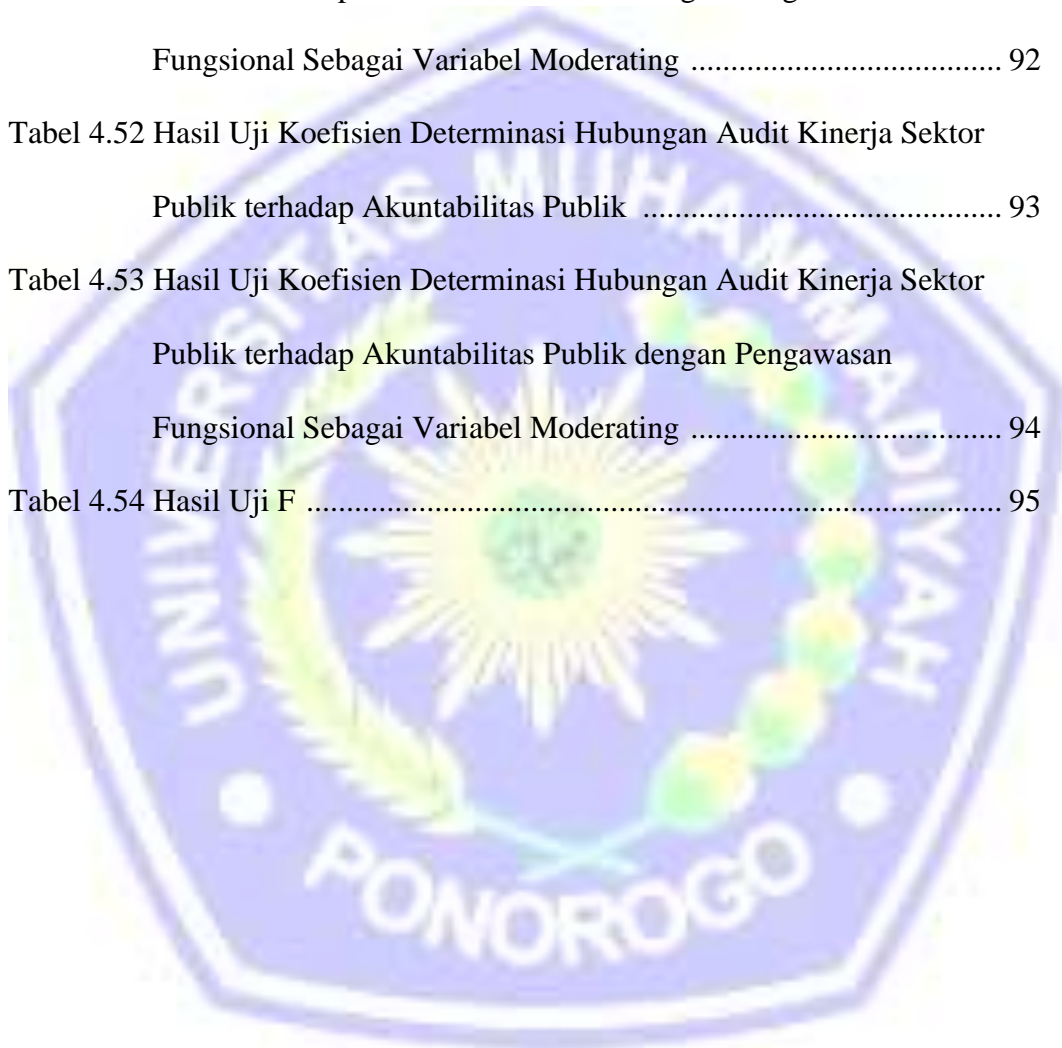
Tabel 4.9 Pernyataan Tentang Perlu Auditor Independen (BPK / Kantor Akuntan Publik) untuk Melakukan Audit Eksternal	64
Tabel 4.10 Pernyataan Tentang Perlu Penyelenggaraan Catatan Tentang Penyimpangan Keuangan oleh BAWASDA	65
Tabel 4.11 Pernyataan Tentang Perlu Adanya Batasan Waktu yang Ditetapkan Untuk Menangani Laporan atau Keluhan dari Masyarakat oleh BAWASDA	65
Tabel 4.12 Pernyataan Tentang Pemerintah Daerah Dalam Mencari Dana Maupun Menggunakan Dana Selalu Menerapkan Prinsip Ekonomi, Efisien, dan Efektif	66
Tabel 4.13 Pernyataan Tentang Value For Money Merupakan Jembatan untuk Mengantar Pemerintah Daerah Mencapai <i>Good Governance</i> yaitu Pemerintah Daerah yang Transparan, Ekonomis, Efisien, Efektif Responsive dan Akuntabel	66
Tabel 4.14 Pernyataan Tentang Perlu Pengkomunikasian Setiap Laporan Kepada Pihak-Pihak Pengguna	67
Tabel 4.15 Pernyataan Tentang Saya Berperan Penuh dalam Memberikan Masukan Saat Penyusunan dan Arah Kebijakan APBD	67
Tabel 4.16 Pernyataan Tentang Saya Tidak Seberapa Berperan Penuh Saat Penyusunan Arah dan Kebijakan APBD	68
Tabel 4.17 Pernyataan Tentang Aspirasi Masyarakat Menjadi Dasar Dalam Rangka Penyusunan APBD	68

Tabel 4.18 Pernyataan Tentang Pengawasan APBD Dilakukan Secara Internal dan Eksternal	69
Tabel 4.19 Pernyataan Tentang Pengawasan Pengelolaan oleh APBD Dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Secara Rutin	69
Tabel 4.20 Pernyataan Tentang Pimpinan atau Atasan Langsung Secara Rutin Menilai Kinerja Bawahan Pengguna APBD	70
Tabel 4.21 Pernyataan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Secara Aktif Mengawasi Mekanisme Pengelolaan APBD	70
Tabel 4.22 Pernyataan Tentang Pengawasan yang Dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan APBD Preventif dan Repreritif	71
Tabel 4.23 Pernyataan Tentang DPRD Secara Aktif Melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran dengan Menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan	71
Tabel 4.24 Pernyataan Tentang Pengesahan Anggaran, DPRD Terlibat Penuh	72
Tabel 4.25 Pernyataan Tentang Revisi Anggaran Dilakukan dengan Alasan Skala Prioritas	72
Tabel 4.26 Pernyataan Tentang Renstrada dan Arah Kebijakan Umum APBD Merupakan Dasar dalam Pengelolaan APBD	73
Tabel 4.27 Pernyataan Tentang Tahapan Pengelolaan APBD Melibatkan Semua Unsur-Unsur Masyarakat	73

Tabel 4.28 Pernyataa Tentang Pengelolaan APBD Disajikan Secara Terbuka, Cepat dan Tepat Kepada Seluruh Masyarakat	74
Tabel 4.29 Pernyataan Tentang Kepentingan Publik dan Golongan Menjadi Pertimbangan dan Perhatian Utama dalam Pengelolaan APBD	74
Tabel 4.30 Pernyataan Tentang APBD Merupakan Dokumen Rahasia Namun Masyarakat Perlu Tahu untuk Menciptakan Ketransparanana	75
Tabel 4.31 Pernyataan Tentang Indikator Hasil Kinerja yang Akan Dicapai Ditetapkan dan Telah Digunakan untuk Mengevaluasi Pengelolaan APBD	75
Tabel 4.32 Pernyataan Tentang Proses dan Pertanggungjawaban APBD Diawasi Secara Terus Menerus	76
Tabel 4.33 Pernyataan Tentang Penyajian APBD Telah Menyertakan Informasi Masa Lalu	76
Tabel 4.34 Pernyataan Tentang Dalam Mengevaluasi APBD Hanya Memperbandingkan dengan Realisasi / Sesungguhnya.....	77
Tabel 4.35 Pernyataan Tentang Pengelolaan APBD Dipertanggungjawabkan Kepada Otoritas yang Lebih Tinggi (Vertical) dan Kepada Masyarakat Luas (Horizontal)	77
Tabel 4.36 Pernyataan Tentang Jaminan Pengelolaan APBD Merupakan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Lain yang Diisyaratkan Dalam Pengelolaan APBD	78
Tabel 4.37 Hasil Uji Validitas	79

Tabel 4.38 Hasil Uji Reliabilitas Data	80
Tabel 4.39 Kriteria Uji Durbin Watson	81
Tabel 4.40 Hasil Uji Autokorelasi Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik	81
Tabel 4.41 Hasil Uji Autokorelasi Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating	82
Tabel 4.42 Hasil Uji Multikolinearitas Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik	83
Tabel 4.43 Hasil Uji Multikolinearitas Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating.....	84
Tabel 4.44 Hasil Uji Heterokedastisitas Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik	85
Tabel 4.45 Hasil Uji Heterokedastisitas Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating	85
Tabel 4.46 Hasil Uji Normalitas Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik	87
Tabel 4.47 Hasil Uji Normalitas Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating	88
Tabel 4.48 Hasil Analisis Regresi Sederhana	89

Tabel 4.49 Hasil Analisis Regresi Berganda	90
Tabel 4.50 Hasil Uji Analisis Korelasi Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik	91
Tabel 4.51 Hasil Uji Analisis Korelasi Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating	92
Tabel 4.52 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik	93
Tabel 4.53 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating	94
Tabel 4.54 Hasil Uji F	95



DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2.1 Ilustrasi Karakteristik 14

Gambar 2.2 Skema Paradigma Penelitian 42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002).

Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui

pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dalam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara ditingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Saat ini di Indonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan suatu standar akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah. Namun tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus pada sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan penekanannya pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas berbagai dimensi.

Ellwood (1993) dalam Boy dan Siringoringo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output.

Audit sektor publik merupakan audit yang dilakukan terhadap entitas sektor publik seperti pemerintahan, BUMN/BUMD, yayasan, partai politik, badan/lembaga amil zakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga/organisasi/badan hukum lain yang dananya bersumber dari masyarakat. Secara teknik, audit sektor publik adalah sama saja dengan audit pada sektor swasta. Jenis-jenis audit terdiri dari audit keuangan (financial audit), audit kinerja (performance audit), dan audit investigasi (special audit).

Audit yang dilakukan pada sektor pemerintah tidak hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja pemerintah tersebut. Audit Kinerja menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) yaitu pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Audit Kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang

diaudit. Audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya, yang membedakan antara audit kinerja dengan audit lainnya adalah dalam hal laporan audit. (Mardiasmo 2002)

Menurut Supardi dan Wiarty (2010) dalam audit keuangan, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak hanya sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Menurut Kalangi (2012) menyebutkan bahwa komponen akuntabilitas dan administrasi publik memiliki peran penting dalam hal layanan publik. Audit kinerja berguna sebagai alat manajemen, terutama untuk memahami proses penetapan tujuan dari pemerintah daerah, dan hasil audit dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus

terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Menurut Rahayu (2011) menyebutkan bahwa pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah (PP No. 20 Tahun 2001). Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat menggunakan berbagai tipe audit pemerintahan. Aparat pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah benar-benar dapat mendukung dan mendorong proses terwujudnya good governance dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satu instansi yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah (Rahayu, 2011).

Instansi ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah, termasuk kecamatan, kelurahan atau desa selain itu juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen dalam negeri di kabupaten atau kota (Rahayu, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) ,menemukan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintahan Kota Bandung.

Sadeli (2008) dalam penelitiannya tentang profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern terhadap pelaksanaan audit pemerintahan dan implikasinya kepada akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah menjelaskan bahwa profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern berpengaruh positif terhadap pelaksanaan audit pemerintahan.

Supardi dan Wiarty (2010) dalam penelitiannya tentang Peranan Audit Kinerja dalam Menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Bandung menjelaskan bahwa peranan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik sebesar 17% dan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain diluar audit kinerja, misalnya pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, manajerial dan pengawasan fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan uraian uraian diatas yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menjadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan di daerah yang berbeda dengan variabel yang berbeda dan teknik analisis data yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan jumlah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Ponorogo.
2. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap audit kinerja sektor publik dalam mempengaruhi akuntabilitas publik.

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap audit kinerja sektor publik dalam mempengaruhi akuntabilitas publik.

1.3.2. Manfaat penelitian :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan akuntansi sektor publik yang khususnya tentang audit sektor publik.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemberian informasi mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pembangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi.

